

## DINAMIKA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN UMUM DASAR DAN MENENGAH KOTA PEKALONGAN DI ERA ORDE BARU

Arditya Prayogi<sup>1\*</sup>, Nurul Husnah Mustika Sari<sup>2</sup>, M. Syaifuddin<sup>3</sup>, Novianto Ade Wahyudi<sup>4</sup>  
<sup>1-4</sup>UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia  
Email: arditya.prayogi@uingusdur.ac.id\*

---

### Article History

Received: 20-05-2024

Revision: 31-05-2024

Accepted: 12-06-2024

Published: 20-06-2024

**Abstract.** In history, quantitative development data can be used as important data in building a historiography. This article aims to reconstruct the history of general education development by utilizing quantitative data in Pekalongan City during the Pelita V era (1989-1994). Pekalongan City itself is an important city that was once the capital of the Pekalongan Residency which was projected as a trading city where the educational aspect was important to build. This article was written using the historical method with stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The main data source is statistical data obtained from Pekalongan report data in figures issued by BPS, as well as government policy archives stored at the City Government Archives Office. The data obtained was then analyzed using a development history approach from a development politics perspective. Based on the results of the analysis, it was found that the condition of general education at the primary and secondary levels in Pekalongan City in Pelita V, seen from the aspect of the number of schools, teachers and students, generally experienced fluctuations/dynamics. In this case, the development of general education at the primary level at PELITA V in Pekalongan City is going well, even though there is inequality. At the secondary level, both junior and senior educational development tends to be stagnant.

**Keywords:** Educational Development, General Education, Pelita V

**Abstrak.** Dalam sejarah, data-data kuantitatif pembangunan dapat digunakan sebagai salah satu data penting dalam membangun suatu historiografi. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi sejarah pembangunan Pendidikan umum dengan memanfaatkan data-data kuantitatif yang ada di Kota Pekalongan pada masa Pelita V (1989-1994). Kota Pekalongan sendiri merupakan kota penting yang pernah menjadi ibukota Karesidenan Pekalongan yang diproyeksikan sebagai kota perdagangan yang dengannya aspek Pendidikan menjadi penting untuk dibangun. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data utama berupa data statistik yang didapatkan dari data laporan Pekalongan dalam angka yang dikeluarkan oleh BPS, serta arsip kebijakan pemerintah yang tersimpan di Kantor Arsip Pemerintah Kota. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah pembangunan dengan sudut pandang politik pembangunan. Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil bahwasanya kondisi pendidikan umum tingkat dasar dan menengah di Kota Pekalongan pada Pelita V, dilihat dari aspek jumlah sekolah, guru, dan murid, secara umum mengalami fluktuasi/dinamika. Dalam hal ini, pembangunan pendidikan umum di tingkat dasar pada PELITA V di Kota Pekalongan berjalan dengan baik, meski terjadi ketimpangan. Di tingkat menengah, baik pertama maupun atas pembangunan pendidikan yang dilakukan cenderung stagnan.

**Kata Kunci:** Pembangunan Pendidikan, Pendidikan Umum, Pelita V

---

**How to Cite:** Prayogi, A., Sari, N. H. M., Syaifuddin, M., & Wahyudi, N. A. (2024). Dinamika Pembangunan Pendidikan Umum Dasar dan Menengah Kota Pekalongan di Era Orde Baru. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (3), 3189-3204. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1066>

---

## PENDAHULUAN

Setiap kota terus berdinamika, baik cepat atau pun lambat (Abdullah, 2005). Dinamika suatu kota sangat berkaitan dengan manusia yang menghuninya. Gerak langkah manusia sebagai penghuni kota sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Dinamika perkembangan kota, yang dalam hal ini berarti kualitas manusia penghuninya dapat diukur dengan alat ukur yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) diketengahkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) pada tahun 1990 yang mengukur tingkat kemajuan suatu wilayah dengan melihat pada tiga aspek, yaitu ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan (Siagian, 1982). Ulasan terkait IPM menjadi hal yang menarik karena ketiga aspek IPM, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Ulasan mengenai aspek IPM dalam suatu wilayah masih sering menjadi domain ilmu sosial ekonomi, utamanya ilmu ekonomi pembangunan. Namun demikian, sejarah juga dapat menempatkan diri sebagai suatu ilmu yang mengkaji aspek IPM suatu wilayah, utamanya terkait dengan dinamika manusia didalamnya yang berkaitan erat dengan sejarah pembangunan. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan pendekatan tersendiri agar sejarah dapat menangkap makna dari data-data pembangunan (berupa statistik IPM) agar karya sejarah yang terbangun (historiografi) dapat secara utuh tergambar (Prayogi, 2024). Pembahasan IPM oleh sejarawan tentu akan berakhir pada karya kualitatif yang berangkat dari data kuantitatif. Selain itu, ulasan sejarah (historiografi) kota yang mengambil kajian dari aspek IPM juga masih jarang ditemukan. IPM masih merupakan hal baru dalam ilmu sejarah. Semua sumber untuk IPM adalah data statistik, Hal ini menjadi sesuatu yang menarik karena data statistik yang ada tidak dapat dicerna begitu saja oleh masyarakat umum. Secara konseptual, data-data terkait IPM tidak bisa ditarik ke tahun-tahun sebelum adanya IPM. Namun, ketiga indikatornya, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat ditarik ke belakang.

Kota Pekalongan adalah salah satu kota yang menggunakan IPM sebagai alat ukur perkembangan kota. Data-data indikator statistik IPM Kota Pekalongan terdapat dalam buku seri yang berjudul Kotamadya Pekalongan dalam Angka dan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka yang merupakan bagian dari seri penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Buku ini memuat data statistik yang sangat komprehensif meliputi berbagai data statistik geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian, perindustrian dan energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata, keuangan dan harga-harga, serta pendapatan regional. Seluruh data yang ada dalam seri penerbitan ini berupa data statistik.

Tiga aspek yang digunakan untuk mengukur IPM pun dimuat dalam buku ini. Tiap tahunnya data-data ini senantiasa mengalami perubahan. Perubahan data tersebut terjadi tergantung kepada kebijakan pemerintah kota. Secara konseptual, perubahan angka-angka statistik ini tidak banyak diulas. Di sisi lain, kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi terjadinya perubahan yang kemudian direkam dalam angka statistik. Dinamika seperti ini kemudian tidak dimuat dalam seri penerbitan dari Badan Pusat Statistik yang cenderung sinkronis. Hal demikianlah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan telaah pada berbagai data statistik tersebut yang dengannya dapat tergambar suatu historiografi dengan cerita yang utuh. Di antara tiga aspek IPM, penelitian ini fokus pada pembahasan di bidang pendidikan. Alasannya adalah karena pendidikan adalah dasar bagi kemakmuran ekonomi dan kesehatan. Perlu pula diingat, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia salah satunya berasal dari sumbangsih kelas intelektual-terdidik.

Pada umumnya pembangunan merupakan salah satu isu yang paling menarik dalam suatu pemerintahan, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah selalu menetapkan beberapa program pembangunan di wilayahnya masing-masing. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target dalam proses pembangunan. Adanya pembangunan diharapkan akan terjadi suatu perubahan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Paradigma pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 1960 sampai dengan saat ini. Pada kurun waktu 1960-1970, pemerintah menekankan pada paradigma pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan (Hidayat, 2004). Pada tahap selanjutnya terjadi pergeseran ke arah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, karena paradigma pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan kesenjangan antara golongan yang kaya dengan golongan miskin.

Melihat kondisi tersebut, selama kurun waktu 1970-1980 pemerintah Indonesia berupaya keras untuk menerapkan paradigma pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dengan menerapkan program-program pembangunan kepada daerah-daerah miskin dan pelosok-pelosok desa untuk mengejar ketertinggalan (Sari & Purhadi, 2021). Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) merupakan salah satu rencana pemerintah dalam rangka meningkatkan proses pembangunan. Rencana pembangunan tersebut dilakukan setiap lima tahun sekali secara berkesinambungan. Mulai dari Repelita pertama, Repelita kedua, Repelita ketiga, Repelita keempat, dan Repelita kelima (Rahmawati, 2022).

Aspek spasial dalam penelitian ini ialah kota pekalongan. Kota Pekalongan memiliki sejarah yang panjang. Keterkaitan kota Pekalongan dengan aspek pendidikan (formal) sejatinya telah dimulai pada masa Hindia-Belanda. Dalam hal ini, Kota Pekalongan telah

diberikan hak otonomi sebagai *Gewest/Residensi* yang membawahi berbagai *Afdeling* (setingkat Kabupaten). Pendirian *Europees School* di Pekalongan pada medio 1820 menjadi bukti awal pemerintah Hindia-Belanda di bidang pendidikan kala itu (Moehadi dkk., 1981). Sebagai konsekuensi dari pembangunan kota pusat administrasi dan pemerintahan, maka kebutuhan akan tenaga kerja terdidik menjadi meningkat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu, pemerintah Hindia-Belanda kemudian membangun berbagai sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai tinggi (Ricklefs, 2001).

Pemerintah Hindia-Belanda juga mengizinkan berdirinya beberapa lembaga pendidikan berbasis agama (Islam dan Kristen) di Karesidenan Pekalongan, termasuk pula sekolah wanita. Dalam hal ini, pemerintah Hindia-Belanda tidak hanya memproyeksikan Pekalongan menjadi pusat perdagangan dan transportasi tetapi juga menetapkannya sebagai ibu kota Karesidenan Pekalongan (Asa, 2006). Dengan menjadi ibukota karesidenan maka, pendidikan menjadi penting dalam proses pembangunan wilayah. Dinamika pembangunan pendidikan terus berlangsung di hingga masa pendudukan Jepang. Di masa ini, perhatian pemerintah pendudukan Jepang membangun *Gyomin Doozyo* atau sekolah perikanan laut di Kota Pekalongan. Lebih lanjut, di awal Orde Baru, berdiri Fakultas Syari'ah cabang Pekalongan sebagai cabang dari IAIN Walisongo (Moehadi dkk., 1981). Namun demikian, yang menjadi titik tekan aspek pembangunan pendidikan ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jenjang tersebut merupakan jenjang yang sangat mendasar. Sebagai pondasi, pembenahan pendidikan harus dimulai dari jenjang dasar dan menengah, terutama dalam hal pemerataan. Karena pentingnya jenjang pendidikan ini, maka fokus artikel ini ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Aspek temporal dalam artikel ini adalah tahun 1989-1994 bertepatan dengan pelaksanaan Pelita V. Berdasarkan GBHN 1988 memberikan arahan kepada pembangunan Pelita V. Di dalamnya terdapat dua tujuan Pelita V, yaitu meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat secara merata. Kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. Dari arahan GBHN 1988, dapat diketahui bahwa salah satu fokus pembangunan pada 1989-1994 adalah pendidikan.

Perumusan pembangunan pendidikan Orde Baru dilaksanakan secara serius pada masa Pelita, terutama Pelita II hingga V. Berdasarkan GBHN 1988, diberikan arahan kepada pembangunan Pelita V yang didalamnya terdapat dua tujuan Pelita V, yaitu pertama, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat secara merata dan kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. Dari arahan GBHN 1988, terutama pada PELITA V dapat diketahui bahwa salah satu fokus pembangunan

pada 1989-1994 adalah pendidikan (Alam & Sarimaya, 2017). Dengan demikian, menjadi penting untuk mengungkap secara historis dinamika pembangunan pendidikan di kota Pekalongan di masa ini.

## **METODE**

Artikel ini digunakan metode penelitian sejarah. Secara sistematis penelitian sejarah secara sederhana dapat dijabarkan dalam lima tahap, yaitu heuristik, verifikasi/kritik, interpretasi, dan historiografi/penulisan sejarah (Herlina, 2008). Pada tahap pertama, heuristik dapat pula dimaknai dengan tahap pengumpulan sumber yang merupakan kegiatan menghimpun data dari berbagai sumber terkait dengan topik yang dipilih, yang akan digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah untuk mencapai tujuan penelitian itu sendiri dan akan diuji kebenarannya berdasarkan pengalaman atau penemuan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini, berbagai macam sumber dikumpulkan, seperti buku, jurnal, artikel maupun tulisan-tulisan yang relevan dan kemudian dilakukan analisis keterkaitan dengan topik yang diteliti. Pencarian sumber, utamanya sumber primer dilakukan di Kantor Arsip Kota Pekalongan, Perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan, Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan serta Perpustakaan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sedangkan sumber sekunder didapatkan dengan menelusuri beberapa sumber elektronik, utamanya *website* resmi lembaga dan artikel jurnal elektronik yang berkaitan.

Sumber yang telah dicari dan dikumpulkan kemudian diseleksi. Tahap penyeleksian sumber disebut tahap kritik. Data yang diperoleh melalui tahap heuristik harus dikritik atau ditelaah sehingga diperoleh data yang objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini langkah-langkah dalam kritik intern antara lain; membaca dan mempelajari suatu sumber data untuk menyesuaikan isi dari sumber data dengan peristiwa yang tertuang didalam buku; mengecek kebenaran dan kesesuaian antara tanggal dari buku dengan peristiwa yang tertuang didalam buku; koraborasi, kontradiksi dan pengukuran. Dalam penelitian ini, data yang terkumpul berupa data statistik. Penyeleksian data statistik adalah dengan melihat data statistik tahun satu pada data statistik tahun berikutnya. Umumnya, data statistik, misalnya tabel jumlah sekolah tahun 1988, informasi sebelumnya pada umumnya terdapat data tabel jumlah sekolah pada tahun 1987, 1986, dan 1985. Dengan begitu ada irisan antara satu data dengan data lainnya. Apabila tahun utama, misalnya 1988 itu sama dengan tahun informasi 1988 di tabel tahun 1989 maka kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan lainnya adalah dengan mengumpulkan data dari dinas terkait, dalam hal ini berupa arsip data yang ada di dinas kearsipan.

Setelah mendapatkan data pada tahap heuristik dan selesai melakukan verifikasi atau kritik sumber, langkah selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah proses penafsiran fakta sejarah. Terdapat dua point penting dalam interpretasi atau penafsiran sejarah, yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) (Kuntowijoyo, 2003). Data yang telah dimaknai adalah fakta. Suatu fakta yang dibiarkan berdiri sendiri atau sejumlah fakta yang disusun berurut secara kronologis tanpa adanya suatu interpretasi terhadap fakta tersebut, belumlah menjadi sebuah kisah sejarah. Dalam melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang ada, sedapat mungkin sikap subyektif diminimalisir, sehingga menjadi suatu kesatuan yang logis dan harmonis. Fakta yang ditemukan harus mendapat dukungan dari fakta-fakta lainnya, yang disebut proses koraborasi (Herlina, 2008).

Dalam penelitian ini, langkah-langkah dari interpretasi data sejarah, dilakukan dengan beberapa cara antara lain, pertama, menguraikan data-data dari sumber yang berbeda. Kedua, merekonstruksi dan menyatukan fakta-fakta yang diperoleh dari beberapa sumber sejarah. Ketiga, menafsirkan fakta-fakta ke dalam kalimat bermakna, yang berkesimbangan antara satu dengan lainnya. Setelah semua proses dilakukan, proses selanjutnya adalah penulisan sejarah yang disebut dengan tahap historiografi. Pada tahap ini semua fakta disusun menjadi bentuk narasi yang kronologis. Setelah pengumpulan sumber, kemudian dilakukan verifikasi atau kritik sumber menjadi data-data, kemudian data-data yang telah dihimpun, ditafsirkan atau dimaknai sehingga menjadi fakta sejarah, kemudian langkah terakhir dalam metode penelitian ini adalah peneliti menyusun seluruh data yang telah melewati tahap diatas menjadi sebuah tulisan utuh dengan jenis tulisan naratif-deskriptif.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Gambaran Umum Pendidikan Kota Pekalongan Pra Pelita V**

Secara keadaan sosial di Kota Pekalongan tergolong multi etnis dan agama. Kota Pekalongan juga dikenal sebagai kota religius dengan tingkat regulitas yang cukup tinggi. Indikator ini cukup bisa dirasakan dari banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan di Kota Pekalongan. Secara ekonomi, letaknya yang cukup strategis membuat Kota Pekalongan menjadi kota yang pertumbuhan ekonominya cukup pesat dibandingkan kota-kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya diantara Jakarta dan Surabaya yang strategis dan berada pada jalur pantura, menjadikan Kota Pekalongan, maju dalam perekonomiannya terutama pada bidang tekstil, industri, perikanan dan perumahan. Pada bidang perikanan sendiri. Kota Pekalongan mempunyai pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Dimana pada pelabuhan ini sering menjadi transi tujuan dan area untuk melakukan pelelangan hasil tangkapan laut yang

langsung dari para nelayan bahkan dari berbagai daerah. Sehingga produsen dan perusahaan para pengolah hasil laut seperti ikan asin, terasi, sarden, dan berbagai kerupuk ikan. Mendirikan perusahaannya di Kota Pekalongan (Pemerintah Kota Pekalongan, 2006).

Kota Pekalongan membentang antara 6°50'42"–6°55'44" LS dan 109°37'55"–109°42'19" BT. Berdasarkan koordinat fiktifnya, Kota Pekalongan membentang antara 510,00–518,00 Km membujur dan 517,75–526,75 Km melintang. Luas Kota Pekalongan adalah 45,25 Km<sup>2</sup> atau 0,14 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang seluas 3.254 ribu Km<sup>2</sup>. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai ± 9 Km, sedangkan dari Barat ke Timur mencapai ± 7 Km. Secara Administratif (saat ini) Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 (empat) Kecamatan yang tiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan: a. Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 13 kelurahan. b. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 13 kelurahan c. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 9 kelurahan d. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 8 kelurahan Di sebelah utara, wilayah Kota Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, dan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang (Pemerintah Kota Pekalongan, 2006). Dengan kondisi spasial demikian, Kota Pekalongan penduduk sejumlah 138.141 jiwa pada tahun 1988 atau satu tahun sebelum dimulainya Pelita V. Pada tahun berikutnya, atau pada tahun awal dimulainya Pelita V pada 1989, terjadi penurunan jumlah penduduk dimana pada tahun ini penduduk Kota Pekalongan berjumlah 137.889 jiwa. Jika dilihat lebih lanjut, penurunan jumlah penduduk di Kota Pekalongan lebih karena adanya migrasi ke luar Kota Pekalongan (Bandiyono & Indrawardani, 2010). Untuk lebih jelas terkait jumlah penduduk dapat lihat tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Penduduk Kota Pekalongan Tahun 1988-1989

Tahun	Rumah Tangga	Anggota Rumah Tangga		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1988	-	66.513	71.628	138.141
1989	-	66.362	71.572	137.889

Sumber: Kotamadya Pekalongan dalam Angka (Badan Pusat Statistik, 1988)

Kepadatan penduduk Kota Pekalongan terdapat di wilayah Pekalongan Barat. Penyebabnya adalah wilayah Pekalongan Barat adalah wilayah yang menjadi pusat kegiatan dengan banyaknya fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini wilayah Pekalongan Barat dijadikan wilayah pengembangan pendidikan, sentra industri kerajinan, perhotelan, pusat pemerintahan/ perkantoran, dan pusat gelanggang olah raga (Sabana, 2007). Lebih lanjut, jumlah penduduk kategori anak yang termasuk dalam kategori anak usia sekolah jika merujuk pada UU no. 4 Tahun 1979 adalah penduduk yang belum mencapai usia 21 tahun.

Dalam hal ini, rentang usia anak mencakup anak usia sekolah dari jenjang dasar sampai menengah pertama dan atas atau dari umur 7-20 tahun.

**Tabel 2.** Penduduk usia sekolah Kota Pekalongan Tahun 1988-1989

Tahun	Anggota Rumah Tangga (ART)		Jumlah	Jumlah Penduduk
	Anak			
	Laki-laki	Perempuan		
1988	22.470	23.124	45.594	138.141
1989	22.913	23.847	46.760	137.889

Sumber: Kotamadya Pekalongan dalam Angka (Badan Pusat Statistik, 1988)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk anak tahun 1988 adalah 45.594 jiwa. Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anak usia sekolah adalah sekitar 33% dari jumlah penduduk di Kota Pekalongan. Pada 1989, jumlah anak usia sekolah adalah 46.760 jiwa. Dalam hal ini terjadi peningkatan jumlah sebanyak 1.166 jiwa. Hal demikian justru berbanding terbalik dengan jumlah penduduk keseluruhan yang justru mengalami penurunan. Persentase jumlah anak meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sekitar 34% dari jumlah penduduk.

**Tabel 3.** Jumlah sekolah, guru, dan murid negeri dan swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah Kota Pekalongan Tahun 1988

1988	SD	SMTP	SMTA/K	Jumlah
Sekolah	121	21	20	162
Guru	1.001	506	563	2.070
Murid	21.894	8.564	8.801	39.259

Sumber: Kotamadya Pekalongan dalam Angka (Badan Pusat Statistik, 1989)

**Tabel 4.** Jumlah sekolah, guru, dan murid negeri dan swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah Kota Pekalongan Tahun 1989

1989	SD	SMTP	SMTA/K	Jumlah
Sekolah	121	21	20	162
Guru	1.010	515	666	2.191
Murid	21.803	8.442	9.093	39.338

Sumber: Kotamadya Pekalongan dalam Angka (Badan Pusat Statistik, 1990)

Dari tabel di atas, didapatkan gambaran mengenai kondisi penting pendidikan di Kota Pekalongan pra Pelita V, berupa aspek jumlah sekolah, guru, dan murid. Jenjang SD/ sederajat di Kota Pekalongan memiliki jumlah sekolah, guru dan murid terbanyak jika dibandingkan dengan jenjang SMTP dan SMTA. Yang menarik, jumlah siswa yang menempuh sekolah, baik di SD, SMTP, dan SMTA ternyata jumlahnya tidak sampai setengah dari jumlah anak usia sekolah di tahun yang sama. Artinya, terdapat *problem* partisipasi sekolah (formal) di Kota Pekalongan pada pra Pelita V. Dapat pula diketahui terkait rasio pendidikan, utamanya rasio antara guru dan murid. Dalam hal ini rasio antara guru dan murid di tingkat SD pada 1988



sebesar 1:22. Pada tingkat SMTP sebesar 1:17 dan pada tingkat SMA sebesar 1:16. Pada tahun 1989, rasio di tingkat SD sebesar 1:21, di tingkat SMTP sebesar 1:16, dan di tingkat SMTA sebesar 1:14. Kondisi demikian paling tidak menggambarkan bahwasanya kondisi pendidikan di Kota Pekalongan pra Pelita V sudah mendekati ideal (Qori'atunnadyah, 2022).

### **Dinamika Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Pekalongan di Era Orde Baru (1989-1994)**

#### *Tingkat Pendidikan Dasar*

Pendidikan dasar merupakan awal dari rangkaian panjang pendidikan. Pendidikan dasar mendapat perhatian dari pemerintah dengan adanya kebijakan khusus. Pendidikan dasar sendiri berupa pendidikan di sekolah dasar (SD). Tabel berikut menggambarkan kondisi SD di Kota Pekalongan tahun 1990-1994.

**Tabel 5.** Jumlah sekolah, murid, dan guru sekolah dasar di Kota Pekalongan 1990-1994

TAHUN	Sekolah		Murid		Guru		Rasio	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1990	134	26	23.688	5.779	979	221	1:24	1:26
1991	137	26	23.316	5.966	1.051	225	1:22	1:26
1992	137	26	22.898	5.921	1.053	225	1:22	1:26
1993	137	26	23.844	5.816	957	221	1:25	1:26
1994	131	26	21.800	5.825	994	227	1:22	1:25

Sumber: Kotamadya Pekalongan dalam Angka (Badan Pusat Statistik, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994)

Dari tabel di atas, didapatkan gambaran mengenai dinamika pembangunan pendidikan di tingkat dasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada Pelita V. Pada SD Negeri, terjadi kenaikan jumlah sekolah sebanyak tiga sekolah, dari 134 sekolah di awal tahun Pelita V (1990) menjadi 137 sekolah hingga tahun 1993. Meski demikian, penurunan jumlah sekolah terjadi di tahun terakhir Pelita V (1994) sebanyak 6 sekolah menjadi 131 sekolah. Penurunan jumlah sekolah negeri di tahun 1994 berbanding lurus dengan penurunan jumlah siswa. Hal demikian dapat diakibatkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Namun demikian, penyebab yang paling menonjol yaitu keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) sekitar sekolah sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah anak usia sekolah (Putri dkk., 2019), dan/atau orang tua siswa yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta ataupun madrasah. Selain itu, keputusan rumah tangga untuk menyekolahkan anaknya ke SD dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi. Pada akhir Pelita IV,

salah satu faktor penghambat anak usia 7-12 tahun bersekolah, salah satunya adalah orang tua yang tidak mampu secara ekonomi. Upaya ini ditanggulangi oleh program orang tua asuh dan pembebasan biaya pendidikan, meski upaya ini tidak selalu berhasil dilakukan di Kota Pekalongan.

Kondisi demikian juga didukung dengan tren kenaikan jumlah murid di sekolah swasta, meski dalam beberapa tahun terdapat sedikit penurunan. Misal, hal ini dapat dilihat di tahun 1994 sebagai tahun terakhir Pelita V yang menunjukkan adanya penurunan tajam murid SDN, meski di sisi lain, terdapat penambahan murid di sekolah swasta mesti tidak banyak. Yang perlu pula menjadi perhatian, bahwasanya jumlah sekolah swasta yang ada di Kota Pekalongan pada Pelita V cenderung stagnan dengan berjumlah 26 sekolah. Jumlah sekolah swasta yang stagnan selama Pelita V ini juga berbanding lurus dengan jumlah siswanya yang juga cenderung stagnan. Hal demikian dapat diartikan bahwasanya pembangunan pendidikan dengan pelibatan pihak swasta masih bersifat jalan di tempat (stagnan). Pemerintah Kota Pekalongan nampaknya belum dapat memberi suatu inisiasi yang mampu merangsang tumbuhnya sekolah swasta karena beberapa alasan. Dengan demikian, tumbuhnya sekolah swasta sesungguhnya lebih banyak ditentukan oleh militansi perjuangan guru, kepala sekolah, serta para pengurusnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi bagian dari bidang yang dapat dikelola secara profit/professional (Sudriamunawar, 2002).

Lebih lanjut, dari data di atas, dapat pula diperoleh gambaran bahwasanya, meskipun jumlah sekolah dan murid di sekolah negeri cenderung mengalami penurunan, namun jumlah guru lebih mengalami kenaikan meski bersifat fluktuatif. Hal yang sama juga terjadi pada guru di sekolah swasta. Yang perlu diperhatikan, terjadi ketimpangan jumlah guru di sekolah negeri berbanding sekolah swasta. Hal ini sejatinya masih merupakan hal yang wajar, mengingat jumlah sekolah antara sekolah negeri dan swasta yang juga cukup timpang. Dengan demikian, fluktuatifnya jumlah siswa dan guru ini akan memengaruhi rasio guru dan murid. Sebagaimana data, rasio guru dan murid selama Pelita V dapat dikategorikan mendekati ideal, terutama jika dilihat pada sekolah negeri yang ada di angka 1:22 di akhir tahun Pelita V (1994).

### *Tingkat Pendidikan Menengah Pertama*

Pendidikan menengah terdiri dari dua jenjang yaitu sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Istilah SLTP baru digunakan pada tahun ajaran 1990/1991 setelah sebelumnya dinamakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) pada tahun ajaran 1989/1990. Jenjang pendidikan ini merupakan kelanjutan dari jenjang

pendidikan dasar. Lulusan SD/ sederajat diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang ini. Alasannya, lulusan SD/MI masih belum memiliki keterampilan, jika tidak melanjutkan pendidikan maka lulusan SD/MI menjadi angkatan kerja yang belum terampil. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi SLTP di Kota Pekalongan pada masa Pelita V.

**Tabel 6.** Jumlah sekolah, murid, dan guru SLTP di Kota Pekalongan 1990-1994

TAHUN	Sekolah		Murid		Guru		Rasio	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1990	15	9	6.702	2.763	373	157	1:18	1:17
1991	15	9	6.967	2.741	366	134	1:19	1:20
1992	15	9	7.123	2.793	360	175	1:20	1:16
1993	14	9	7.425	2.952	368	170	1:20	1:17
1994	14	9	7.902	2.987	354	162	1:22	1:18

Sumber: Kotamadya Pekalongan dalam Angka (Badan Pusat Statistik, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994)

Dari tabel di atas, didapatkan gambaran mengenai dinamika pembangunan pendidikan di tingkat menengah pertama yang ada di Kota Pekalongan pada Pelita V. Pada SLTP Negeri, terjadi penurunan di tahun-tahun akhir Pelita V, dari 15 sekolah di awal tahun Pelita V (1990) menjadi 14 sekolah di tahun 1993-1994. Meski demikian, penurunan jumlah SLTP negeri ini ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan jumlah siswa. Tercatat, pada SLTP negeri, jumlah murid terus bertambah setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 3%. Hal demikian dapat diakibatkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Namun demikian, penyebab yang paling menonjol yaitu keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan Orde Baru. Dengan wajib belajar 9 tahun ini maka output SDM dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidup. Keberhasilan laporan gerakan wajib belajar yang dilaksanakan sejak tahun 1984/1995 sampai akhir Pelita V menunjukkan keberhasilan penuntasan wajib belajar dimana angka partisipasi murni (APM) dapat dicapai di atas 90% (Cahyaningsih, 2016).

Kondisi demikian juga didukung dengan tren kenaikan jumlah murid di SLTP swasta secara berkesinambungan. Yang perlu pula menjadi perhatian, bahwasanya jumlah SLTP swasta yang ada di Kota Pekalongan selama Pelita V cenderung stagnan dengan berjumlah 9 sekolah. Lebih lanjut, dari data di atas, dapat pula diperoleh gambaran bahwasanya, meskipun penurunan jumlah SLTP negeri juga dibarengi dengan penurunan jumlah guru SLTP negeri. Hal yang sama juga terjadi pada guru di sekolah swasta. Yang perlu diperhatikan, terjadi

ketimpangan jumlah guru di SLTP berbanding SLTP swasta. Hal ini sejatinya masih merupakan hal yang wajar, mengingat jumlah sekolah antara SLTP negeri dan SLTP swasta yang juga cukup (masih) timpang. Hal demikian mengakibatkan terjadinya fluktuasi rasio guru dan murid. Sebagaimana data, rasio guru dan murid selama Pelita V dapat dikategorikan ideal, terutama jika dilihat pada sekolah swasta yang ada di angka 1:18 di akhir tahun Pelita V (1994).

#### *Tingkat Pendidikan Menengah Atas*

Jenjang pendidikan menengah atas dikenal dengan singkatan SLTA. Istilah SLTA baru digunakan pada tahun ajaran 1990/1991. SLTA terbagi menjadi tiga jenis, yaitu SLTA umum, SLTA kejuruan, dan Madrasah Aliyah (MA). Dua sekolah pertama dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah terakhir oleh Departemen Agama. Ketiganya merupakan pendidikan lanjutan bagi lulusan SLTP umum, kejuruan, atau MTs. Di Kota Pekalongan, pada Pelita V, data terkait pendidikan tingkat menengah atas umum berupa SMTA. Berikut adalah tabel SMTA/SLTA di Kota Pekalongan pada Pelita V.

**Tabel 7.** Jumlah sekolah, murid, dan guru SLTA di Kota Pekalongan 1990-1994

TAHUN	Sekolah		Murid		Guru		Rasio	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1990	9	11	4.601	4.682	347	332	1:13	1:14
1991	-	-	4.531	4.604	314	369	1:14	1:12
1992	7	11	4.687	4.462	305	351	1:15	1:13
1993	6	11	4.194	4.831	245	350	1:17	1:14
1994	6	11	4.023	4.961	244	337	1:16	1:15

Sumber: Kotamadya Pekalongan dalam Angka (Badan Pusat Statistik, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994)

Dari tabel di atas, didapatkan gambaran mengenai dinamika pembangunan pendidikan di tingkat menengah atas yang ada di Kota Pekalongan pada Pelita V. SLTA baik negeri maupun swasta yang ada pada tabel di atas merupakan SLTA dalam bentuk SLTA umum maupun SLTA kejuruan. Pada SLTA Negeri, terjadi penurunan di tahun-tahun akhir Pelita V, dari 9 sekolah di awal tahun Pelita V (1990) menjadi 6 sekolah di tahun 1993-1994. Penurunan jumlah SLTA negeri ini ternyata berbanding lurus dengan penurunan jumlah siswa. Tercatat, pada SLTA negeri, jumlah murid terus berkurang setiap tahunnya dengan rata-rata pengurangan sebesar 3%. Hal demikian dapat diakibatkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Penyebab demikian dikarenakan masih belum adanya kebijakan wajib

belajar 12 tahun, serta masih adanya lulusan SMTP Keahlian yang mana lulusannya telah dibekali keterampilan bekerja. Dengan kondisi demikian maka, jenjang SMTA menjadi tidak terlalu dilirik oleh lulusan SMTP (Supriyoko, 1994).

Kondisi demikian berkebalikan dengan SLTA swasta. Dalam hal ini SLTA swasta mengalami penambahan jumlah murid meskipun tidak signifikan dengan kondisi jumlah sekolah yang tetap selama Pelita V yaitu 11 sekolah. Artinya, meskipun jumlah sekolah SLTA swasta stagnan, namun penambahan jumlah murid menunjukkan bahwa keberadaan SLTA swasta mampu menyerap lulusan SLTP secara baik. Apalagi, jumlah siswa SLTA negeri dan swasta tidak berbeda jauh. Artinya, SLTA swasta bisa jadi lebih diminati oleh murid SLTP dan memberi akses yang lebih luas mengingat jumlahnya yang juga lebih banyak dari sekolah negeri. Banyaknya jumlah SLTA swasta dibandingkan SLTA negeri juga berbanding lurus dengan banyaknya guru di SLTA swasta.

Dari tabel di atas juga didapatkan gambaran bahwa jumlah guru SLTA Negeri secara konsisten mengalami penurunan. Hal demikian nampaknya disebabkan dengan syarat guru SMTA/SLTA yang “diharapkan” lebih tinggi dari jenjang SLTP dan SD. Di sisi lain, jumlah guru SLTA swasta mengalami fluktuasi meski di akhir tahun pelaksanaan Pelita V jumlah sedikit lebih banyak dari awal tahun pelaksanaan Pelita V. Hal demikian mengakibatkan terjadinya fluktuasi rasio guru dan murid. Sebagaimana data, rasio guru dan murid selama Pelita V masih dapat dikategorikan ideal, terutama jika dilihat pada sekolah swasta yang ada di angka 1:15 di akhir tahun Pelita V (1994).

## **KESIMPULAN**

Artikel ini dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain, pertama, titik tekan aspek pembangunan pendidikan ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jenjang tersebut merupakan jenjang yang sangat mendasar. Sebagai pondasi, pembenahan pendidikan harus dimulai dari jenjang dasar dan menengah, terutama dalam hal pemerataan. Berdasarkan GBHN 1988 terdapat dua tujuan dalam pembangunan di masa PELITA V, yaitu meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat secara merata dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa salah satu fokus pembangunan pada masa ini adalah pendidikan. Kedua, jenjang dalam pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan pada PELITA V dapat dirinci menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat pendidikan dasar, lanjutan pertama, dan lanjutan atas. Tingkat pendidikan dasar berupa Sekolah Dasar. Tingkat pendidikan lanjutan pertama berupa, yaitu SMTP/SLTP umum, dan SLTP kejuruan. Tingkat pendidikan lanjutan atas berupa SMTA/SLTA umum, dan

SMTA/SLTA kejuruan. Untuk mengetahui kondisi umum ketiga tingkatan itu dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu sekolah, murid, dan guru. Ketiga, kondisi pendidikan di Kota Pekalongan pra PELITA V, dilihat dari aspek jumlah sekolah, guru, dan murid, secara umum mengalami fluktuasi. Jenjang SD/ sederajat di Kota Pekalongan memiliki jumlah sekolah, guru dan murid terbanyak jika dibandingkan dengan jenjang SMTP dan SMTA. Yang menarik, jumlah siswa yang menempuh sekolah, baik di SD, SMTP, dan SMTA ternyata jumlahnya tidak sampai setengah dari jumlah anak usia sekolah di tahun yang sama. Artinya, terdapat *problem* partisipasi sekolah (formal) di Kota Pekalongan pada pra PELITA V.

Keempat, pembangunan pendidikan di tingkat dasar pada PELITA V di Kota Pekalongan berjalan dengan baik, meski terjadi ketimpangan, terutama pada aspek jumlah guru di sekolah negeri berbanding sekolah swasta. rasio guru dan murid selama Pelita V dapat dikategorikan mendekati ideal. Di tingkat menengah pertama, pembangunan yang dilakukan cenderung stagnan. Yang perlu diperhatikan, hal demikian mengakibatkan terjadinya fluktuasi rasio guru dan murid. Sebagaimana data, rasio guru dan murid tingkat menengah pertama selama PELITA V juga dapat dikategorikan ideal. Di tingkat menengah atas, terdapat kondisi dimana jumlah guru SLTA Negeri secara konsisten mengalami penurunan. Di sisi lain, jumlah guru SLTA swasta mengalami fluktuasi meski di akhir tahun pelaksanaan PELITA V jumlah sedikit lebih banyak dari awal tahun pelaksanaan Pelita V. Hal demikian mengakibatkan terjadinya fluktuasi rasio guru dan murid meski masih dapat dikategorikan ideal.

## REFERENSI

- A'la, & Prayogi, A. (2024). Implementation of Classroom Management in Improving the Learning Process of Islamic Religious Education at SDN Pajomblangan Pekalongan. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran dan Kebudayaan*, 1(1), 1-13.
- Abdullah, T. (Ed.). (2005). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Alam, F. N., & Sarimaya, F. (2017). Widjojonomics Sampai Habibienomics. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 6(2), 203–216. <https://doi.org/10.17509/factum.v6i2.9985>
- Arditya, P. (2023). Pers dan Pergerakan: Membaca Sikap Politik Surat Kabar Fadjar Asia 1927-1930.
- Asa, K. (2006). *Batik Pekalongan dalam Lintasan Sejarah*. Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan.
- Asa, K., & Yahya, M. L. (2021). *Sejarah Pekalongan (Pekalongan History)*. Pekalongan: Yayasan Peduli Sejarah Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (1988). *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1987*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (1989). *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1988*. Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. (1990). *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1989*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (1991). *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1990*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (1992). *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1991*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (1993). *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1992*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (1994). *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1993*. Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (1989). *REPELITA V*. Jakarta: Bappenas.
- Bandiyono, S., & Indrawardani, K. F. (2010). Tinjauan Migrasi Penduduk Desa-Kota, Urbanisasi dan Dampaknya. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *V*(1), 41–54.
- Cahyaningsih, G. D. (2016). Latar Belakang Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun 1984. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, *4*(3), 979–989.
- Herlina, N. (2008). *Metode Sejarah*. Satya Historika.
- Hidayat, S. (2004). Paradigma Pembangunan dan Kapabilitas Aparatur. *Wacana Kinerja*, *7*(4), 17–24.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Moehadi, Surojo, AM. D., Jamin, J., Pratitis K, T., Noer, D., Ngga, Y., & Bahun, T. Dj. (1981). *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah* (S. Kutoyo, Ed.). Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemerintah Kota Pekalongan. (2006). *Penelusuran Hari Jadi Kota Pekalongan*. Pemerintah Kota Pekalongan.
- Prayogi, A. (2024). How to Implement the Philosophy of History in Historiography: A Study. *Futurity Philosophy*, *3*(1), 64-76.
- Prayogi, A., Jawani, R., Akhiroh, & Markholis. (2024). User Education Perpustakaan: Upaya Pembekalan Literasi Dasar Perpustakaan bagi Mahasiswa UIN Gusdur Pekalongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Larisma*, *1*(1), 15-19.
- Putri, P. K. D., Hubeis, A. V., & Sarwoprasodjo, S. (2019). Kelembagaan Dan Capaian Program Keluarga Berencana (KB): Dari Era Sentralisasi Ke Desentralisasi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *14*(1), 1. <https://doi.org/10.14203/jki.v14i1.335>
- Qori'atunnadyah, M. (2022). Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Rasio Guru-Murid Pada Jenjang Pendidikan Menggunakan Algoritma K-Means. *Journal of Informatics Development*, *1*(1), 33–38.
- Rahmawati, R. (2022). Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru. *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan*, *IX*(2), 36–42.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Palgrave.
- Sabana, C. (2007). *Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan Di Jawa Tengah* [Tesis Program Pascasarjana]. Universitas Diponegoro.
- Sari, M., & Purhadi, P. (2021). Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur Dan Jawa Tengah Tahun 2019 Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal. *Jurnal Gaussian*, *10*(1), 149–158. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.v10i1.30022>
- Sarnoto, A. Z., Prayogi, A., Rais, R., Putra, P. P., Himawati, I. P., Krisnaresanti, A., & Pakpahan, E. M. (2023).
- Siagian, S. P. (1982). *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Gunung Agung.
- Sudriamunawar, H. (2002). *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Mandar Maju.

- Supriyoko. (1994). Peningkatan Penyelenggaraan SLTP Keterampilan. *Jurnal Ilmu Pendidikan, 1*(1), 44–52.
- Zuhriah, A., & Prayogi, A. (2024). Internalization of Religious Moderation in the IPNU-IPPNU Organization Branch of Bebel Village, Pekalongan Regency. *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin, 1*(1), 21-34.